



Peran Diplomasi TNI Angkatan Laut pada Operasi Penanggulangan Bencana guna Peningkatan Citra Indonesia di Kancah Internasional

Madu Susilo¹, Rizal Musa Karim², Yulis Andreas Lorintus³

^{1,2,3}Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut, Indonesia

E-mail: teguhuwa124@gmail.com, rizalmusa4296@gmail.com, yulisandreas23@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2026-03-07 Revised: 2026-04-13 Published: 2026-05-11 Keywords: <i>Humanitarian Assistance and Disaster Relief;</i> <i>Nation Branding;</i> <i>Smart Power;</i> <i>Navy Diplomacy;</i> <i>ANP.</i>	This study aims to formulate priority strategies for the Indonesian Navy's Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR) operations as a smart power instrument to enhance Indonesia's nation branding. The research is grounded in the premise that HADR operations serve not only humanitarian purposes but also function as strategic tools for naval diplomacy and national image building. Methodologically, the Analytic Network Process (ANP) is employed to analyze complex interrelationships and feedback among decision-making elements. The ANP model is structured around three primary criteria: HADR Operational Capability, Effectiveness of Naval Diplomacy, and Impact on Nation Branding. These are further disaggregated into nine sub-criteria and four strategic alternatives, namely Rapid Response Task Force, Health Diplomacy, Multilateral Exercises, and Public Diplomacy and Strategic Communication. The results indicate that the Impact on Nation Branding holds the highest weight (0.656054), followed by the Effectiveness of Diplomacy (0.257226), and Operational Capability (0.086720). At the sub-criteria level, Positive Image of Indonesia is the dominant factor (0.504692) followed by Authority as a Maritime Nation at (0.204641). Consequently, Health Diplomacy emerges as the top strategic priority (0.362056), followed by Multilateral Exercises (0.268683), Public Diplomacy and Strategic Communication (0.231707), and Rapid Response Task Force (0.137554). These findings suggest that the Indonesian Navy's HADR strategy should prioritize approaches that integrate humanitarian action with the strengthening of Indonesia's international authority, image and bargaining position.

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2026-03-07 Direvisi: 2026-04-13 Dipublikasi: 2026-05-11 Kata kunci: <i>Operasi Kemanusiaan dan Penanggulangan Bencana;</i> <i>Nation Branding;</i> <i>Smart Power;</i> <i>Diplomasi Angkatan Laut;</i> <i>ANP.</i>	Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi prioritas dalam pelaksanaan operasi kemanusiaan dan penanggulangan bencana oleh TNI Angkatan Laut sebagai instrumen <i>smart power</i> guna memperkuat nation branding Indonesia. Penelitian ini didasarkan pada pemikiran bahwa operasi kemanusiaan dan penanggulangan bencana tidak bertujuan dalam aspek kemanusiaan namun berfungsi sebagai alat strategis diplomasi angkatan laut dan pembangunan citra nasional. Secara metodologis, <i>Analytic Network Process</i> (ANP) digunakan untuk menganalisis hubungan kompleks dan umpan balik antar elemen pengambilan keputusan. Model ANP disusun berdasarkan tiga kriteria utama yakni Kemampuan Operasional kemanusiaan dan penanggulangan bencana, Efektivitas Diplomasi Angkatan Laut, dan Dampak pada Citra Nasional. Kriteria ini selanjutnya diuraikan menjadi sembilan sub-kriteria dan empat alternatif strategis, yaitu Gugus Tugas Respons Cepat, Diplomasi Kesehatan, Latihan Multilateral, dan Diplomasi Publik dan Komunikasi Strategis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dampak pada Citra Nasional memiliki bobot tertinggi (0,656054), diikuti oleh Efektivitas Diplomasi (0,257226), dan Kemampuan Operasional (0,086720). Pada tingkat sub-kriteria, Citra Positif Indonesia merupakan faktor dominan (0,504692) diikuti oleh Otoritas sebagai Negara Maritim (0,204641). Akibatnya, Diplomasi Kesehatan muncul sebagai prioritas strategis utama (0,362056), diikuti oleh Latihan Multilateral (0,268683), Diplomasi Publik dan Komunikasi Strategis (0,231707), dan Gugus Tugas Respons Cepat (0,137554). Temuan ini menunjukkan bahwa strategi HADR Angkatan Laut Indonesia harus memprioritaskan pendekatan yang mengintegrasikan aksi kemanusiaan dengan penguatan otoritas, citra, dan posisi tawar internasional Indonesia.

I. PENDAHULUAN

Indonesia berada pada posisi geografis sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dan terletak di antara dua samudra yang memegang

peran sentral dalam jalur komunikasi laut (*Sea Lines of Communication/SLOC*) dan jalur perdagangan laut utama (*Sea Lines of Trade/SLOT*) (Susmoro et al., 2019). Namun,

kondisi geografis tersebut juga menempatkan Indonesia pada area *Ring of Fire* yang memberikan kerentanan tinggi terhadap bencana alam (Adri et al., 2021). Hal ini berkembang seiring dengan bertambahnya jumlah bencana alam yang terjadi di wilayah Asia Pasifik yang menyumbang lebih dari 40% terhadap total bencana dunia, kondisi ini menegaskan urgensi bagi Indonesia untuk memiliki kesiapan kapabilitas mobilitas laut untuk mendukung kemanusiaan dan penanggulangan bencana di seluruh wilayah Indonesia. (Susmoro, 2019). Dalam konteks tersebut, peningkatan peran Indonesia di tingkat regional dan global menuntut keterlibatan bagi Indonesia untuk berpartisipasi dalam misi kemanusiaan global dan regional semakin mendesak sekaligus mencerminkan tanggung jawab Indonesia dalam komunitas internasional.

Kemampuan Indonesia dalam penanggulangan bencana dan kemanusiaan telah menunjukkan kompetensi yang baik serta ditopang oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah melalui berbagai pelatihan, rencana tanggap darurat, serta penguatan sistem peringatan dini di berbagai wilayah Indonesia (Akhirianto et al., 2025). Kemampuan ini menjadi preseden positif tentang keterlibatan pemerintah, tidak terkecuali yang telah dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menginisiasi kebijakan pemerintah untuk melaksanakan operasi penanggulangan bencana dan kemanusiaan di tingkat nasional (Fatimah et al., 2023). Peran serta TNI dilakukan tidak hanya bertindak sebagai instrumen pertahanan, tetapi juga berperan aktif dalam menginisiasi kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan operasi penanggulangan bencana dan misi kemanusiaan melalui doktrin Operasi Militer Selain Perang (OMSP) (Wende et al., 2023). Kemampuan TNI tersebut menjadi jembatan dalam memperkuat sinergitas sipil dan militer (Bollen & Kalkman, 2022), di mana penerapan doktrin tersebut sering kali membutuhkan kecepatan mobilisasi dan ketepatan logistik di luar kapasitas sipil (Stette et al., 2023), sedangkan di sisi lain, peran tersebut memberikan bukti penegasan *soft diplomacy* yang dilakukan oleh TNI sebagai bagian dalam perwujudan komponen bangsa yang turut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial (Djuyandi et al., 2019). Kemampuan ini juga menjadi bukti bahwa kekuatan militer bukan hanya berfungsi sebagai kekuatan tempur, melainkan juga sebagai unsur

kemanusiaan yang mampu meraih simpati dari masyarakat internasional, di mana paradigma peran militer telah mengalami transformasi besar dari penggunaan kekuatan fisik menjadi pendekatan yang lebih halus melalui diplomasi pertahanan (Cottey & Forster, 2004). Hal ini menekankan adanya pemanfaatan sumber daya militer untuk tujuan yang bersifat damai, dalam membangun kepercayaan, dan dalam menghindari terjadinya konflik.

Sebagai bagian dari TNI, TNI Angkatan Laut turut serta menginisiasi melalui tugas pokok TNI Angkatan Laut yang tertuang dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2004 untuk melaksanakan tugas diplomasi dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, 2004). Secara operasional hal ini dilakukan dengan bentuk kehadiran dan pengerahan unsur laut yang berfungsi sebagai *Benign Naval Diplomacy*, instrumen *confidence-building*, sekaligus sarana memperluas koneksi kerja sama regional melalui aktivitas non-tempur seperti *humanitarian assistance and disaster relief* (HADR) (Mière, 2014). Sehingga, kesiapan unsur-unsur TNI Angkatan Laut, seperti kapal rumah sakit, helikopter, dan pangkalan, sangat penting digunakan sebagai kebutuhan operasional, dan aset diplomasi Indonesia di tingkat regional dan internasional serta menjadi prasyarat utama untuk merespons krisis di wilayah regional (Haras, 2017; Marsetio, 2024).

Namun demikian, fakta di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan misi diplomasi TNI Angkatan Laut melalui operasi kemanusiaan dan penanggulangan bencana masih menghadapi sejumlah tantangan operasional, terutama pada aspek interoperabilitas dan koordinasi antar sektor dimana sering kali muncul gesekan atau keterlambatan dalam mekanisme komunikasi antar lembaga sipil seperti BNPB dan Kementerian Luar Negeri, serta badan pemerintah negara penerima bantuan (Abdeen et al., 2021). Kendala birokrasi dalam pelaksanaan prosedur penempatan unsur kekuatan TNI/TNI Angkatan Laut ke luar negeri sering kali memperlambat waktu respons, meskipun kecepatan merupakan faktor penentu dalam keefektifan penanganan bencana (Campioni et al., 2023). Di samping itu, permasalahan tersebut membawa dampak pada isu yang lebih besar, yakni belum maksimalnya transformasi keberhasilan operasi ini menjadi keuntungan diplomasi (*diplomatic leverage*)

terhadap citra Indonesia. Kekuatan *soft power* Indonesia melalui bantuan bencana tidak selalu menghasilkan kecenderungan terhadap negara pemberi bantuan, namun dibatasi oleh cara pandang masyarakat dan konteks politik yang diberikan (Blair, 2021). Hal ini disebabkan oleh kurangnya rencana komunikasi yang strategis dan *branding* internasional yang terkoordinasi, sehingga dampak positif terhadap reputasi dan citra Indonesia sering kali tidak sebanding dengan banyaknya sumber daya yang diinvestasikan (Cull, 2022).

Kondisi ini semakin rumit akibat perubahan lingkungan strategis di kawasan Indo-Pasifik, di mana kegiatan kemanusiaan dan penanggulangan bencana berevolusi menjadi sarana persaingan pengaruh bagi negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok (Levaillant, 2024). Negara-negara kawasan dunia saling berlomba memberikan bantuan bencana untuk menanamkan pengaruh politik di kawasan, sehingga hal ini akan mempengaruhi peran Indonesia dalam peningkatan citra positifnya dan berisiko tertutup oleh dominasi narasi negara-negara besar tersebut. Ketidakmampuan Indonesia untuk memimpin respons bencana di tingkat regional dapat melemahkan posisi tawar Indonesia sekaligus mengurangi sentralitas ASEAN di mata negara tetangga. Karena itu, kapasitas diplomasi Indonesia perlu diwujudkan melalui kepemimpinan dan kontribusi konkret dalam penanganan bencana, agar reputasi Indonesia sebagai mitra yang andal dan berpengaruh semakin kuat di kawasan maupun dunia (Gong & Nanthini, 2022). Berangkat dari pemahaman tersebut, diplomasi pertahanan Indonesia yang umumnya terkonsentrasi pada penggunaan *hard power* dengan pendekatan kekuatan militer (*alutsista*), strategi pertahanan dan kerja sama strategis antar kekuatan militer suatu negara (Anwar, 2014; Supriyanto, 2012). Akibatnya, eksaminasi terhadap operasi kemanusiaan dan penanggulangan bencana sebagai manifestasi *soft power*, walaupun proyeksi pengaruh internasional dan legitimasi melalui daya tarik (*attraction*) merupakan elemen yang belum dieksplorasi secara mendalam (Seavey, 2022).

Berangkat dari uraian tersebut, terdapat kebutuhan mendesak untuk meneliti lebih mendalam terhadap metode diplomasi TNI Angkatan Laut yang disesuaikan dengan posisi Indonesia sebagai negara kepulauan dan negara aktor yang memiliki sumber daya strategis yang besar (Inkiriwang, 2021). Melalui peningkatan operasi militer selain perang oleh TNI dalam dua

dekade terakhir, keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh kemampuan negara dalam mengelola kegiatan kemanusiaan tersebut sebagai alat pengaruh, serta respons terhadap bencana sebagai penerapan kegiatan kemanusiaan dalam mendukung kepentingan dan tujuan politik luar negeri (Reinhardt & Lutmar, 2022). Karena itu, langkah-langkah kemanusiaan perlu dipersiapkan dalam misi penyelamatan, sekaligus penerapan diplomasi negara yang berkesinambungan.

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian campuran (*mixed-methods*) dengan fokus utama pada pendekatan *Analytic Network Process* (ANP). Pendekatan ini dipilih karena diplomasi TNI Angkatan Laut dalam operasi kemanusiaan merupakan sistem yang kompleks dengan hubungan saling ketergantungan (*interdependence*) dan umpan balik (*feedback*) antarunsur yang tidak bersifat linear (Saaty & Luis G Vargas, 2006). Penggunaan metode ANP memungkinkan peneliti memetakan pengaruh timbal balik antara aktor, kebijakan, dan dampak citra internasional secara lebih presisi. Tahapan awal penelitian diawali dengan menghimpun data kualitatif melalui studi dokumentasi (*peraturan, laporan, press release*) dan wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan terkait. Data ini dianalisis untuk mengidentifikasi dan membentuk jaringan kriteria dan alternatif. Setelah model jaringan terbentuk, dilakukan penyusunan kuesioner berdasarkan skala perbandingan berpasangan (*pairwise comparison*) Saaty (1-9) (Saaty & Vargas, 2012). Responden dalam tahap ini adalah para pakar (*expert judgement*) yang memiliki otoritas dan pemahaman mendalam di bidang diplomasi maritim. Proses ini bertujuan untuk mengukur bobot kepentingan antar elemen dalam satu klaster (*inner-dependence*) maupun antar-klaster yang berbeda (*outer-dependence*). Data yang terkumpul kemudian diproses menggunakan perangkat lunak *Super decision* untuk menghasilkan tiga jenis matriks utama, yaitu *Unweighted Supermatrix* yang menunjukkan bobot awal dari pengaruh antar-elemen, *Weighted Supermatrix* yang mencerminkan bobot yang telah disesuaikan dengan kepentingan relatif tiap klaster, serta *Limit Supermatrix* yang merupakan hasil akhir yang telah mencapai titik keseimbangan (konvergensi) dan memberikan nilai prioritas terhadap elemen-elemen strategis

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Identifikasi Kriteria

Dalam konteks operasi kemanusiaan dan peanggulangan bencana, kemampuan respons cepat, dukungan medis dan evakuasi, serta kapasitas logistik menunjukkan bahwa keberhasilan misi kemanusiaan TNI Angkatan Laut sangat bergantung pada kemampuan dalam operasi yang dapat digerakkan secara efektif di lapangan, oleh karena itu, hal ini membentuk kriteria kapabilitas operasional operasi kemanusiaan dan peanggulangan bencana, yang secara konseptual berakar pada gagasan *smart power* mengenai penggabungan sumber daya *hard* dan *soft power* dalam satu strategi yang efektif (Capie, 2015; Nye, 2004). Sementara itu, pembentukan kepercayaan, kerja sama dan interoperabilitas regional, serta diplomasi publik dan komunikasi strategis memperlihatkan bahwa operasi operasi kemanusiaan dan peanggulangan bencana tidak berhenti pada fungsi kemanusiaan, melainkan juga dapat difungsikan sebagai sarana dalam membangun pengaruh dan hubungan antarnegara (Chang & Jenne, 2020).

Peningkatan citra positif Indonesia, kewibawaan sebagai negara maritim, dan peningkatan posisi tawar internasional menunjukkan bahwa tindakan kemanusiaan juga menghasilkan dampak reputasi positif, sehingga memberikan kontribusi langsung terhadap dampak *nation branding* Indonesia, sejalan dengan pandangan bahwa reputasi negara dibentuk melalui tindakan yang konsisten dan dapat dilihat secara langsung oleh publik internasional (Fan, 2010). Dengan demikian, kriteria ANP dalam penelitian ini disusun dari indikator-indikator empiris menuju tiga dimensi utama, yakni kemampuan operasional, efektivitas diplomatik, dan dampak reputasi Indonesia. reputasi Indonesia di tingkat internasional.

2. Identifikasi Subkriteria

Pada tingkat operasional, efektivitas diplomasi angkatan laut secara langsung membentuk kepercayaan terhadap asumsi publik internasional, karena operasi operasi kemanusiaan dan penanggulangan bencana mempertemukan TNI dengan mitra luar negeri dan negara sahabat

dalam situasi kooperatif yang relatif rendah eskalasi, sehingga membuka ruang bagi terbentuknya *strategic trust* dan *moralistic trust* melalui interaksi yang berulang, transparan, dan berorientasi pada tujuan kemanusiaan. Teori *defence diplomacy*, kegiatan ini merupakan bentuk sarana dalam membangun kepercayaan dan membentuk lingkungan kebijakan luar negeri yang lebih positif (Cottey & Forster, 2004). Secara teoritis, kepercayaan yang mulai terbentuk tidak memberikan dampak strategis tanpa adanya kemampuan kerjasama sehingga *kerja sama dan interoperabilitas*, dapat dijadikan parameter dalam menilai operasi operasi kemanusiaan dan peanggulangan bencana mampu memperkuat koordinasi TNI Angkatan Laut dengan angkatan laut negara lain, lembaga sipil, dan organisasi kemanusiaan (Heaslip & Barber, 2014).

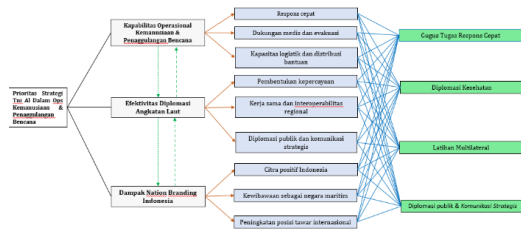
Penggunaan militer dalam respons bencana menunjukkan bahwa tantangan utama terletak pada koordinasi, kolaborasi, dan integrasi logistik sipil-militer. Sejalan dengan itu, operasi kemanusiaan dan peanggulangan bencana angkatan laut di Indo-Pasifik menegaskan bahwa misi ini telah menjadi salah satu peran utama angkatan laut kawasan pasifik sehingga menuntut kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan (Upadhyaya, 2022). Sejalan dengan berjalannya kepercayaan dan interoperabilitas, nilai diplomatik semakin meningkat ketika dikomunikasikan dengan baik, sehingga *diplomasi publik dan komunikasi strategis* digunakan dalam menilai kegiatan operasi kemanusiaan dan penanggulangan bencana dapat direpresentasikan ke dalam narasi kebijakan luar negeri yang dapat dipahami oleh publik. Hal ini dapat dipraktikkan melalui penggunaan media sosial oleh *key influencers* yang secara langsung berperan penting dalam menciptakan dan menyebarkan konten yang membentuk citra nasional (Mazumdar, 2024). Sejalan dengan hal tersebut, *nation branding* dapat dipahami sebagai sebuah simbol atau promosi negara melalui tindakan yang dapat dilihat oleh seluruh masyarakat secara berkesinambungan (Buhmann, 2016). Mengalir dari hal tersebut, operasi kemanusiaan yang dilaksanakan pada aspek maritim, berdampak terhadap *kewibawaan Indonesia sebagai negara*

maritim, karena keberhasilan operasi kemanusiaan dan penanggulangan bencana oleh TNI Angkatan Laut memberikan pemahaman terhadap kapasitas mobilitas, kesiapan, dan kontribusi Indonesia terhadap tata kelola kemanusiaan di kawasan laut regional. Sehingga, aglomerasi citra positif dan kewibawaan maritim dapat bermuara pada peningkatan posisi tawar di kancah internasional, dimana teori *soft power* memberikan pengertian bahwa daya tarik, kredibilitas, dan diplomasi publik sebagai sumber pengaruh yang memungkinkan negara memperoleh hasil politik tanpa paksaan, disamping dapat memberikan pengaruh politik yang lebih besar pada tatanan internasional (Buhmann, 2016; Nye, 2013). Dengan demikian, keenam subkriteria tersebut tersusun yang diawali dari kegiatan operasional yang membangun kepercayaan, berkembang menjadi kerja sama dan komunikasi strategis, lalu berujung pada luaran berupa citra positif, kewibawaan maritim, dan penguatan posisi Indonesia di arena internasional.

3. Identifikasi Alternatif

Dalam penentuan alternatif strategi operasi kemanusiaan dan penanggulangan bencana penggunaan kekuatan TNI Angkatan Laut sebagai instrumen *smart power*, terdapat empat opsi strategis yang dapat dipertimbangkan secara terpadu. Alternatif pertama yakni dengan adanya penguatan gugus tugas operasi kemanusiaan dan penanggulangan bencana TNI Angkatan Laut dengan respons cepat atau tanggap segera yang menekankan pembentukan unit khusus yang selalu siap digerakkan, dilengkapi aset, personel terlatih, dan peralatan kemanusiaan agar mampu merespons bencana dalam waktu singkat; strategi ini relevan karena efektivitas operasi operasi kemanusiaan dan penanggulangan bencana sangat ditentukan oleh keberadaan unit yang memang dirancang dan dipersiapkan secara (Perry, 2018; Tatham & Rietjens, 2016). Alternatif kedua yakni dengan pengembangan diplomasi medis maritim melalui kapal rumah sakit dan tim Kesehatan dengan menempatkan kapabilitas kesehatan angkatan laut sebagai instrumen diplomasi kemanusiaan, di mana alutsista kapal rumah sakit

memiliki nilai diplomatik yang tinggi karena sifatnya yang humaniter, tidak mengancam, dan mudah diterima secara universal, sementara diplomasi pada aspek kesehatan juga terbukti efektif menjembatani perbedaan politik serta membangun hubungan antar masyarakat yang lebih berkelanjutan (Elleman, 2007; Feldbaum & Michaud, 2010). Alternatif ketiga melalui peningkatan latihan serta operasi operasi kemanusiaan dan penanggulangan bencana multilateral di kawasan diarahkan untuk memperkuat partisipasi TNI Angkatan Laut dalam kerja sama keamanan regional dan internasional, baik sebagai peserta, tuan rumah, maupun inisiator, karena latihan multilateral secara seksama dapat meningkatkan kapabilitas teknis, serta berfungsi sebagai mekanisme *confidence building* dan pembentukan norma bersama untuk menghadapi ancaman nontradisional yang bersifat lintas batas (Haacke & Williams, 2008; Caballero-Anthony, 2018). Alternatif keempat yakni melalui integrasi diplomasi publik dan komunikasi strategis dalam setiap operasi operasi kemanusiaan dan penanggulangan bencana menjadi penting agar setiap aksi kemanusiaan TNI Angkatan Laut tidak berhenti pada substansi bantuan, tetapi juga mampu menghasilkan dampak diplomatik dan *nation branding* yang lebih luas melalui dokumentasi, diseminasi media, koordinasi antarlembaga, serta pengelolaan narasi, mengingat dalam era informasi saat ini, nilai suatu tindakan diplomatik sangat dipengaruhi oleh cara tindakan tersebut dikomunikasikan dan dipersepsikan oleh publik global (Melissen, 2005; Cull, 2019). Dengan demikian, keempat alternatif tersebut menunjukkan bahwa strategi operasi kemanusiaan dan penanggulangan bencana TNI Angkatan Laut tidak hanya memerlukan kesiapan operasional, tetapi juga pemanfaatan dimensi medis, kerja sama multilateral, serta komunikasi strategis agar operasi kemanusiaan dapat sekaligus berfungsi sebagai instrumen pengaruh internasional.

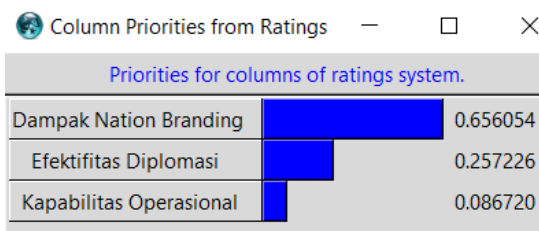


Gambar 1. Model ANP

B. Pembahasan

1. Hasil Analisis Kriteria

Berdasarkan diperoleh bobot prioritas untuk tiga kriteria utama dalam penentuan strategi operasi kemanusiaan dan penanggulangan bencana TNI Angkatan Laut, yaitu Dampak *Nation Branding* sebesar 0,656054, Efektivitas Diplomasi sebesar 0,257226, dan Kapabilitas Operasional sebesar 0,086720. Hasil ini menunjukkan bahwa kriteria yang paling dominan dalam model adalah Dampak *Nation Branding*, dengan kontribusi sekitar 65,61%, disusul oleh Efektivitas Diplomasi sebesar 25,72%, sedangkan Kapabilitas Operasional menempati urutan terakhir dengan bobot 8,67%. Dengan demikian, dalam kerangka pengambilan keputusan ini, pertimbangan strategis lebih banyak diarahkan pada sejauh mana operasi kemanusiaan dan penanggulangan bencana mampu menghasilkan dampak citra dan reputasi bagi Indonesia, dibandingkan pada kemampuan teknis pelaksanaan operasi.



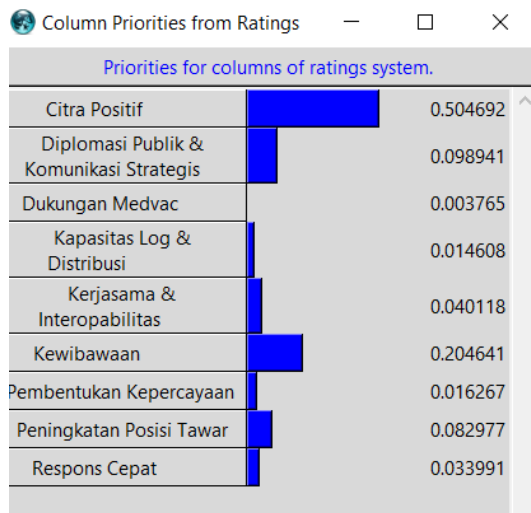
Gambar 1. Hasil Analisa Kriteria

Dominannya kriteria *nation branding* mengindikasikan bahwa operasi kemanusiaan dan penanggulangan bencana TNI Angkatan Laut dipandang sebagai instrumen *smart power* yang tidak berhenti pada fungsi respons bencana, tetapi juga dibentuk sebagai persepsi positif, mempertegas kewibawaan Indonesia sebagai negara maritim, dan meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam hubungan internasional. Selanjutnya, bobot Efektivitas Diplomasi yang berada pada urutan kedua menegaskan bahwa operasi

kemanusiaan dan penanggulangan bencana juga dinilai penting sebagai media diplomasi angkatan laut, terutama dalam membangun kepercayaan, memperkuat kerja sama regional, dan mendukung diplomasi publik Indonesia. Sementara itu, bobot Kapabilitas Operasional yang paling rendah tidak menunjukkan bahwa aspek ini tidak penting, melainkan menempatkannya sebagai prasyarat dasar yang mendukung tercapainya luaran strategis yang lebih tinggi, sebab respons cepat, dukungan medis, dan logistik tetap menjadi fondasi utama bagi keberhasilan operasi di lapangan. Oleh karena itu, hasil ini memperlihatkan bahwa prioritas strategi operasi operasi kemanusiaan dan penanggulangan bencana TNI Angkatan Laut dalam penelitian ini lebih menekankan pada luaran strategis, khususnya penguatan *nation branding* Indonesia, dengan efektivitas diplomasi sebagai mekanisme pendukung utama dan kapabilitas operasional sebagai dasar implementasi.

2. Hasil Analisis Sub Kriteria

Hasil analisis subkriteria menunjukkan bahwa pembentukan Citra Positif oleh Indonesia memperoleh bobot tertinggi sebesar 0,504692 atau sekitar 50,47%, sehingga disimpulkan bahwa dipahami bahwa dalam keseluruhan struktur keputusan, keberhasilan strategi operasi operasi kemanusiaan dan penanggulangan bencana TNI Angkatan Laut paling dominan ditentukan oleh kemampuan dalam membentuk persepsi positif Indonesia di mata internasional. Hasil ini menunjukkan bahwa operasi operasi kemanusiaan dan penanggulangan bencana tidak lagi dipandang semata-mata sebagai instrumen respons kemanusiaan, melainkan sebagai sarana strategis untuk memperkuat reputasi negara melalui aksi nyata yang dapat diamati secara langsung oleh komunitas internasional. Dominannya bobot pada subkriteria ini mengindikasikan bahwa citra Indonesia sebagai negara yang peduli, responsif, dan memiliki kapasitas menjadi tujuan strategis utama yang ingin dicapai melalui pelaksanaan operasi operasi kemanusiaan dan penanggulangan bencana.



Gambar 2. Hasil Analisis Sub Kriteria

Subkriteria dengan bobot terbesar kedua adalah Kewibawaan sebesar 0,204641 atau 20,46%. Bobot ini memperlihatkan bahwa selain membangun citra positif, operasi operasi kemanusiaan dan penanggulangan bencana juga dipandang penting dalam mempertegas posisi Indonesia sebagai negara maritim yang memiliki kemampuan, legitimasi, dan peran strategis di kawasan. Dengan kata lain, setiap operasi operasi kemanusiaan dan penanggulangan bencana yang dijalankan secara efektif bukan hanya menghasilkan dampak kemanusiaan, tetapi juga memperlihatkan kapasitas Indonesia dalam memobilisasi kekuatan maritim untuk kepentingan yang konstruktif. Oleh karena itu, kewibawaan maritim muncul sebagai dimensi penting yang memperkuat identitas Indonesia di tingkat regional maupun internasional.

Selanjutnya, subkriteria Diplomasi Publik dan Komunikasi Strategis memperoleh bobot 0,098941 atau 9,89%, sedangkan Peningkatan Posisi Tawar memperoleh bobot 0,082977 atau 8,30%. Hasil ini menunjukkan bahwa aspek komunikasi dan diplomatik tetap memiliki kontribusi yang signifikan dalam perhitungan tersebut, meskipun tidak sekuat pada aspek citra dan kewibawaan. Temuan ini dapat diartikan bahwa keberhasilan operasi operasi kemanusiaan dan penanggulangan bencana tidak hanya bergantung pada pelaksanaan aksi kemanusiaan, tetapi juga pada kemampuan negara dalam mengelola narasi, menyampaikan pesan, dan mengonversi keberhasilan operasional menjadi manfaat

diplomatik yang lebih luas. Dengan demikian, komunikasi strategis berfungsi sebagai penghubung antara tindakan kemanusiaan dan penguatan posisi Indonesia dalam hubungan internasional.

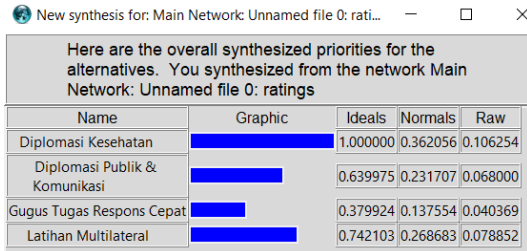
Di sisi lain, subkriteria Kerjasama dan Interoperabilitas (0,040118), Respons Cepat (0,033991), Pembentukan Kepercayaan (0,016267), Kapasitas Logistik dan Distribusi (0,014608), serta Dukungan Kesehatan dan Evakuasi (Medvac) (0,003765) memiliki bobot yang relatif lebih rendah. Rendahnya bobot subkriteria-subkriteria tersebut tidak berarti bahwa aspek tersebut tidak penting, melainkan menunjukkan bahwa dalam kerangka penelitian ini unsur-unsur tersebut lebih ditempatkan sebagai faktor pendukung atau prasyarat operasional untuk mencapai tujuan strategis yang lebih besar. Dengan kata lain, kemampuan teknis dan operasional tetap diperlukan agar operasi operasi kemanusiaan dan penanggulangan bencana dapat berjalan efektif, tetapi nilai strategis utamanya terletak pada hasil akhir yang mampu dihasilkan, terutama dalam bentuk penguatan citra dan kewibawaan Indonesia.

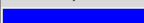



3. Hasil Analisis Alternatif

Berdasarkan hasil *overall synthesized priorities for the alternatives*, alternatif strategi dengan prioritas tertinggi adalah Diplomasi Kesehatan dengan nilai Normals = 0,362056 atau sekitar 36,21%, sehingga dapat dipahami bahwa strategi ini merupakan alternatif paling dominan dalam mendukung operasi kemanusiaan dan penanggulangan bencana TNI Angkatan Laut sebagai instrumen *smart power*.

Posisi kedua ditempati oleh Latihan Multilateral dengan bobot 0,268683 atau 26,87%, disusul Diplomasi Publik & Komunikasi sebesar 0,231707 atau 23,17%, sedangkan Gugus Tugas Respons Cepat berada pada urutan terakhir dengan bobot 0,137554 atau 13,76%. Hasil ini menunjukkan bahwa alternatif yang paling diprioritaskan bukan semata-mata strategi yang berorientasi pada kesiapan teknis-operasional, melainkan strategi yang paling besar kontribusinya dalam menghasilkan dampak diplomatik dan reputasional bagi Indonesia. Dominannya Diplomasi Kesehatan menunjukkan bahwa peman-

faatan kapal rumah sakit, tim medis, dan layanan kesehatan dalam operasi kemanusiaan dan penanggulangan bencana dinilai paling efektif untuk membangun citra positif, meningkatkan kewibawaan Indonesia, dan memperkuat pengaruh kemanusiaan Indonesia di tingkat internasional.



Name	Graphic	Ideals	Normals	Raw
Diplomasi Kesehatan		1.000000	0.362056	0.106254
Diplomasi Publik & Komunikasi		0.639975	0.231707	0.068000
Gugus Tugas Respons Cepat		0.379924	0.137554	0.040369
Latihan Multilateral		0.742103	0.268683	0.078852

Gambar 3. Hasil Analisis Alternatif

Di sisi lain, tingginya bobot Latihan Multilateral mengindikasikan bahwa keterlibatan dalam latihan dan operasi bersama tetap dipandang penting karena mampu memperkuat interoperabilitas, membangun kepercayaan, dan memperluas jejaring kerja sama regional. Adapun Diplomasi Publik & Komunikasi yang menempati urutan ketiga menegaskan bahwa pengelolaan narasi, dokumentasi, dan penyebaran pesan strategis tetap memiliki kontribusi signifikan dalam memperkuat dampak operasi kemanusiaan dan penanggulangan bencana, meskipun nilainya masih berada di bawah diplomasi kesehatan dan latihan multilateral. Sebaliknya, Gugus Tugas Respons Cepat memperoleh bobot paling rendah menunjukkan bahwa dalam kerangka keputusan ini kesiapan respons cepat lebih diposisikan sebagai fondasi operasional, bukan sebagai alternatif yang paling kuat dalam menghasilkan manfaat strategis secara eksternal. Secara keseluruhan, hal ini menegaskan bahwa prioritas strategi operasi kemanusiaan dan penanggulangan bencana TNI Angkatan Laut lebih diarahkan pada pendekatan yang mampu mengombinasikan aksi kemanusiaan dengan pengaruh diplomatik dan pembentukan *nation branding*, sehingga Diplomasi Kesehatan muncul sebagai alternatif strategi paling unggul dalam model ANP yang digunakan.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Hasil analisis ANP menunjukkan bahwa strategi operasi penanggulangan bencana dan kemanusiaan TNI Angkatan Laut lebih diprioritaskan pada kemampuan menghasilkan dampak strategis eksternal, khususnya dalam memperkuat *nation branding* Indonesia. Hal ini tercermin dari bobot kriteria utama, yaitu Dampak Nation Branding sebesar 0,656054, Efektivitas Diplomasi sebesar 0,257226, dan Kapabilitas Operasional sebesar 0,086720. Pada tingkat subkriteria, unsur yang paling dominan adalah Citra Positif dengan bobot 0,504692, diikuti Kewibawaan sebesar 0,204641, Diplomasi Publik dan Komunikasi Strategis sebesar 0,098941, serta Peningkatan Posisi Tawar sebesar 0,082977. Sementara itu, subkriteria operasional seperti Kerjasama dan Interoperabilitas (0,040118), Respons Cepat (0,033991), Pembentukan Kepercayaan (0,016267), Kapasitas Logistik dan Distribusi (0,014608), dan Dukungan Medis dan Evakuasi (0,003765) memiliki bobot yang relatif lebih rendah. Adapun pada tingkat alternatif, Diplomasi Kesehatan menjadi strategi prioritas dengan bobot 0,362056, diikuti Latihan Multilateral sebesar 0,268683, Diplomasi Publik dan Komunikasi sebesar 0,231707, dan Gugus Tugas Respons Cepat sebesar 0,137554. Dengan demikian, operasi penanggulangan bencana dan kemanusiaan TNI Angkatan Laut tidak hanya relevan sebagai instrumen penanggulangan bencana, tetapi juga sebagai sarana *smart power* yang efektif untuk memperkuat citra, kewibawaan, dan posisi Indonesia di tingkat internasional.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian, TNI Angkatan Laut perlu menempatkan diplomasi kesehatan sebagai prioritas dalam pengembangan strategi diplomasi dalam operasi kemanusiaan dan penanggulangan bencana, terutama melalui penguatan kapasitas kapal rumah sakit, tim medis, serta layanan evakuasi kemanusiaan. Selain itu, latihan multilateral operasi kemanusiaan dan penanggulangan bencana perlu terus ditingkatkan untuk memperkuat interoperabilitas, kepercayaan, dan kerja sama kawasan. Sejalan dengan hal tersebut, setiap operasi operasi kemanusiaan dan penanggulangan bencana dapat didukung oleh diplomasi publik dan komunikasi strategis yang terencana agar manfaat operasional dapat dikonversi menjadi

manfaat diplomatik dan reputasional. Bagi penelitian selanjutnya, model analisis dapat diperluas dengan melibatkan lebih banyak pakar serta menambahkan variabel lain yang relevan agar hasil kajian menjadi lebih komprehensif

DAFTAR RUJUKAN

- Abdeen, F. N., Fernando, T., Kulatunga, U., Hettige, S., & Ranasinghe, K. D. A. (2021). International Journal of Disaster Risk Reduction Challenges in multi-agency collaboration in disaster management: A Sri Lankan perspective. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 62(February), 1. <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2021.102399>
- Adri, W., Sabri, L. ., & Wahyuddin, Y. (2021). Jurnal Geodesi Undip Januari 2021. *Jurnal Geodesi Undip Januari 2021. Jurnal Geodesi Undip*, 10(1), 190.
- Akhirianto, N. A., Ma'rufatin, A., Wardani, K. S., Kayadoe, F. J., & Kongko, Wi. (2025). Bridging Policy and Practice in Tsunami Disaster Risk Reduction: Evaluating Local Implementation Challenges in Eastern Indonesia. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 124, 20.
- Anwar, S. (2014). The Role of Defence Diplomacy in Coping With Challenges in The Field of Defence. *Jurnal Pertahanan*, 4(2), 85.
- Blair, R. A. (2021). Foreign Aid and Soft Power : Great Power Competition in Africa in the Early Twenty-first Century. *British Journal of Political Science*, 52(3), 18. <https://doi.org/10.1017/S0007123421000193>
- Bollen, M., & Kalkman, J. P. (2022). Civil-Military Cooperation in Disaster and Emergency Response. *Journal of Advanced Military Studies*, 13(1), 82.
- Buhmann, A. (2016). The constitution and effects of country images: Theory and measurement of a central target construct in international public relations and public diplomacy. *Studies in Communication Sciences*, 16(2), 12. <https://doi.org/10.1016/j.scoms.2016.10.002>
- Campioni, L., Poltronieri, F., Stefanelli, C., Suri, N., Tortonesi, M., & Wrona, K. (2023). Enabling civil-military collaboration for disaster relief operations in smart city environments. *Future Generation Computer Systems*, 139, 190. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.future.2022.09.020>
- Capie, D. (2015). The United States and Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR) in East Asia: Connecting Coercive and Non-Coercive Uses of Military Power. *Journal of Strategic Studies*, 38(3), 328. <https://doi.org/10.1080/01402390.2014.1002914>
- Chang, J. Y., & Jenne, N. (2020). Velvet fists : The paradox of defence diplomacy in Southeast Asia. *European Journal of International Security*, 365(5), 348. <https://doi.org/10.1017/eis.2020.16>
- Cottey, A., & Forster, A. (2004). *Reshaping Defence Diplomacy: New Roles For Military COoperation and Assistance*. Routledge.
- Cull, N. J. (2022). From soft power to reputational security: rethinking public diplomacy and cultural diplomacy for a dangerous age. *Place Branding and Public Diplomacy*, 18(1), 19. <https://doi.org/10.1057/s41254-021-00236-0>
- Djuyandi, Y., Casnoto, H., & Hidayat, W. (2019). Military Operations Other Than War (MOOTW): Synergy of Indonesia National Armed Forces (TNI) and National Disaster Management Agency (BNPB) in Disaster Management. *Humanities & Social Sciences Reviews*, 7(4), 112.
- Elleman, B. A. (2007). *Waves of Hope*. Naval War College.
- Fan, Y. (2010). Branding the nation : Towards. *Place Branding and Public Diplomacy*, 6(2), 101. <https://doi.org/10.1057/pb.2010.16>
- Fatimah, F., Indonesia, U., & Eriyono, R. H. (2023). Operasi Militer Selain Perang dalam Rangka Penanggulangan Bencana Alam di Indonesia : Peluang , Tantangan , dan Studi Komparasi Operasi Militer Selain Perang Dalam Rangka Penanggulangan Bencana Alam di Indonesia : Peluang , Tantangan ,

- dan Studi Komparasi. *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional*, 6(2), 11. <https://doi.org/10.7454/jkskn.v6i2.10083>
- Feldbaum, H., & Michaud, J. (2010). Health Diplomacy and the Enduring Relevance of Foreign Policy Interests. *Medicine*, 7(4), 4. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000226>
- Gong, L., & Nanthini, S. (2022). Collective Response to Disaster in The Indo Pasific: Opportunities an Challenges. *Policy Report*, July, 5.
- Haras, Y. M. (2017). Peran TNI Angkatan Laut Dalam Mendukung Terwujudnay Indoensia Sebagai Poros Maritim Dunia Perspektif Manajemen Pertahanan. *Jurnal Prodi Manajemen Pertahanan*, 3(2), 4.
- Heaslip, G., & Barber, E. (2014). Using the military in disaster relief: systemising challenges and opportunities. *Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management*, 4(1), 72. <https://doi.org/10.1108/JHLSCM-03-2013-0013>
- Inkiriwang, F. W. (2021). Multilateral Naval Exercise Komodo : Enhancing Indonesia' s Multilateral Defence Diplomacy? *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 40(3), 431. <https://doi.org/10.1177/18681034211008905>
- Levaillant, M. (2024). *Aiding competition: The geopolitics of humanitarian aid and disaster relief in the Indo-Pacific*. The European Council on Foreign Relations. <https://ecfr.eu/article/aiding-competition-the-geopolitics-of-humanitarian-aid-and-disaster-relief-in-the-indo-pacific/>
- Marsetio. (2024). *Sea Power Indonesia*. Unhan Press.
- Mazumdar, B. T. (2024). Digital diplomacy: Internet-based public diplomacy activities or novel forms of public engagement? *Place Branding and Public Diplomacy*, 20(1), 35. <https://doi.org/10.1057/s41254-021-00208-4>
- Mière, C. (2014). *Maritime diplomacy in the 21st century: Drivers and challenges*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203555590>
- Nye, J. S. (2004). *Soft Power: The Means to Success in World Politics*. Public Affairs.
- Nye, J. S. (2013). Public Diplomacy and Soft Power Public Diplomacy and Soft Power By. *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 616(May), 107. <https://doi.org/10.1177/0002716207311699>
- Perry, R. W. (2018). Defining Disaster: An Evolving Concept. In H. Rodríguez, W. Donner, & J. E. Trainor (Eds.), *Handbook of Disaster Research* (p. 22). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-63254-4_1
- Reinhardt, G. Y., & Lutmar, C. (2022). Disaster diplomacy: The intricate links between disaster and conflict. *Journal of Peace Research*, 3(11), 9. <https://doi.org/10.1177/00223433221074791>
- Saaty, T. L., & Luis G Vargas. (2006). The Analytic Network Process. In T. L. Saaty & L. G. Vargas (Eds.), *Decision Making with the Analytic Network Process: Economic, Political, Social and Technological Applications with Benefits, Opportunities, Costs and Risks* (p. 2). Springer US. https://doi.org/10.1007/0-387-33987-6_1
- Saaty, T. L., & Vargas, L. G. (2012). *Models , Methods , Concepts & Applications of the Analytic Hierarchy Process Second Edition* (2nd ed., Vol. 175). Springer.
- Seavey, I. (2022). A Tale of Two Storms: U.S. Army Disaster Relief in Puerto Rico and Texas, 1899–1900. *Journal of Advanced Military Studies*, 13(1), 30.
- Stette, M., Porath, K., & Muehlich, S. (2023). Civil-Military Cooperation for the Countering of Threats: Protection of Civilians During the Development of a Threat BT. In K. P. Balomenos, A. Fytopoulos, & P. M. Pardalos (Eds.), *Handbook for Management of Threats: Security and Defense, Resilience and Optimal Strategies* (p. 480). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-031-39542-0_23
- Supriyanto, R. A. (2012). Indonesia's Naval Modernisation: A Sea Change? S.

- Rajaratnam School of International Studies, 20(12).
- Susmoro, H. (2019). *Tol laut dalam perspektif Hidrografi* (D. P. Sobarudin (ed.); 1st ed., p. 1). Pushidrosal.
- Susmoro, H., Trismadi, Amril, & Santosa, D. (2019). *Sejarah Pushidrosal: Sebagai lembaga Hidrografi Nasional Indonesia* (A. Purnomo (ed.)). Pushidrosal.
- Tatham, P., & Rietjens, S. (Bas). (2016). Integrated disaster relief logistics: a stepping stone towards viable civil - military networks? *Disaster*, 40(1), 21.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (2004).
- Upadhyaya, S. (2022). Naval humanitarian assistance and disaster relief (HA/DR) operations in the Indo-Pacific region: need for fresh thinking. *Journal of the Indian Ocean Region*, 18(3), 290. <https://doi.org/10.1080/19480881.2023.2198887>
- Wende, A., Mahroza, J., Hadisancoko, R. E., & Aremu, S. O. (2023). Role of the Armed Forces in Military Operations Other Than War in Managing Natural Disasters. *International Journal Of Humanities Education And Social Sciences (IJHESS)*, 2(5), 1552-1560.